

ANALISIS KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH MENGGUNAKAN STANDART INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (STUDI KASUS PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN PINRANG)

ANALYSIS OF THE CAPABILITY OF THE GOVERNMENT'S INTERNAL
SUPERVISORY APPARATUS USING INTERNAL STANDARDS
AUDIT CAPABILITY MODEL (CASE STUDY AT
INSPECTORATE OFFICE OF PINRANG REGENCY)

Meranti iis. P¹, Yasri Tarawiru², Rika Rahma³, Hasdiana⁴, Darmawan⁵

Universitas Muhammadiyah Parepare: umpar@umpar.ac.id

Email: merantiis24@gmail.com, yasri.se.ak@gmail.com, rhykaaein18@gmail.com,
hasdianailham@gmail.com, darmawan8387@gmail.com

1,2,3 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Pinrang dengan menggunakan standart IACM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kabupaten Pinrang menggunakan Model Kemampuan Audit Internal (IA-CM), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja APIP, dan menyusun strategi untuk meningkatkan kompetensi APIP. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, yang dilanjutkan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang berada pada level 3 berdasarkan IA-CM. Dari enam unsur audit internal, lima unsur: Peran dan Layanan APIP, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola telah mencapai level 3, sementara unsur Pengelolaan Sumber Daya Manusia telah mencapai level 4. Keterbatasan utama terletak pada unsur-unsur yang masih berada di level 3, sehingga peningkatan kompetensi APIP menjadi prioritas. Inspektorat telah menyusun strategi untuk memperkuat *Key Process Area* (KPA) guna mendorong peningkatan kapabilitas menuju level yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Internal Audit Capbility Model (IA-CM)

Abstract

A maximum 250 words abstract in English in italics with Arial 10 point. Abstract should be clear, descriptive, and should provide a brief overview of the problem studied. Abstract topics include reasons for the selection or the importance of research topics, research methods and a summary of the results. Abstract should end with a comment about the importance of the results or conclusions brief. (Italic, font arial 10) This study analyzes the APIP capability in the Pinrang Regency Inspectorate using the IACM standard. The purpose of this study is to analyze the level of competence of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the Pinrang Regency Inspectorate using the Internal Audit Capability Model (IA-CM), identify factors that influence APIP performance, and develop strategies to improve APIP competence. The method



Journal AK-99

ISSN : 2775-6726

Volume 1 Nomor 1, Mei 2021

used is descriptive research with data collection techniques through observation, documentation, and interviews, followed by descriptive analysis. The results of the study indicate that the APIP capability of the Pinrang Regency Inspectorate is at level 3 based on IA-CM. Of the six elements of internal audit, five elements: APIP Role and Services, Organizational Culture and Relationships, and Governance Structure have reached level 3, while the Human Resource Management element has reached level 4. The main limitation lies in the elements that are still at level 3, so improving APIP competence is a priority. The Inspectorate has developed a strategy to strengthen Key Process Areas (KPA) to encourage increased capabilities to a higher level.

Kata Kunci : Level of Capability of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), Internal Audit Capability Model (IA-CM)

PENDAHULUAN

Pengendalian atas kegiatan pemerintahan bersikan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa mata uang negara dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 menguraikan lima prinsip manajemen intern dari General Accounting Office (GAO) yang dikomunikasikan kepada *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO). Yaitu: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) aktivitas pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) pemantauan. Masdan dkk. (2015) menyatakan bahwa tujuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah menjalankan usahanya sesuai dengan paragraf 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa APIP beroperasi secara efektif dalam memberikan jasa assurance dan konsultasi.

APIP merupakan lembaga pemerintah yang secara tekun melakukan pengawasan internal di wilayah hukum dan/atau daerah. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, APIP di setiap lembaga pemerintah memiliki persyaratan yang unik, baik yang terkait dengan pengelolaan sisi, daya sumber yang tersedia, maupun kondisi lingkungan. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kapabilitas APIP di Indonesia. Model Kapabilitas Audit Internal (IACM) yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA) menjadi landasan bagi perluasan kapabilitas APIP. Model ini berfungsi sebagai alat kerja yang mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang dibutuhkan untuk melakukan supervisi intern yang efektif di sektor publik dengan membawa kinerja organisasi ke tingkat profesional. Konsep IACM memiliki beberapa jenjang kapabilitas, mulai dari Tingkat 1 (Awal) hingga Tingkat 5 (Pengoptimalan). Pada setiap jenjang kapabilitas tersebut terdapat proses-proses audit internal seperti APIP dan pemberian layanan, SDM, praktik profesional, pengelolaan dan akuntabilitas kerja, struktur dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. IACM juga dapat dievaluasi secara independen (self-assessment) oleh masing-masing APIP dengan menggunakan elemen kunci terkait dan telah diselesaikan sebelumnya dalam jangka waktu yang lama. Tujuan APIP adalah mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang tinggi. Cakupan ruang berikut dapat dianalisis menggunakan Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP K/L/D (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah): (1) Mekanisme Penilaian terdiri atas: APIP K/L/D melakukan evaluasi APIP mandiri kapabilitas, yang berfungsi sebagai penanggung jawab BPKP untuk menghitung hasil APIP mandiri kapabilitas dan menentukan tingkatannya, serta BPKP dan APIP K/L/D melakukan pemeliharaan. (2) Pengawasan Lingkungan (*Enabler*), Pengawasan Aktivitas (*Delivery*), dan Pengawasan Kualitas (*Outcome*) adalah tiga komponen Penilaian. Dan (3) Aspek Penilaian terdiri dari pelaksanaan, hasil, dan kepatuhan. (4) Periode Penilaian: Setiap tahun, setiap APIP K/L/D antara Triwulan I dan II melakukan evaluasi mandiri;

BPKP melakukan evaluasi independen berdasarkan kinerja APIP.



Berdasarkan hasil kegiatan teknis dan asistensi yang telah dilaksanakan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa masih banyak instansi pemerintah daerah di provinsi tersebut yang kemampuan APIP-nya masih di bawah level 4. Inspektorat Kabupaten Pinrang telah mencapai target untuk mencapai level 3 pada tahun ini, dimana Kantor Inspektorat Pinrang telah melaksanakan proses manajemen audit internal secara profesional dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada level tersebut. Namun, diharapkan Kantor Inspektorat Pinrang dapat meningkatkannya ke level yang lebih tinggi yaitu level 4 agar dapat memberikan kepastian utuh tentang tata kelola, manajemen risiko, dan pengembangan intern.

Penelitian Anggie Pramai Sella dan Dr. Lilik Purwanti, M.Si., CSRS., CSRA., Ak., CA (2019) mengkaji peningkatan aparat pengawasan internal pemerintah dengan menggunakan model kapabilitas audit internal pada Inspektorat Sidoarjo. Penelitian tambahan yang dilakukan oleh Rati Sumanti (2020) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Intern Pemerintah (APIP) di Aceh melalui *Internal Audit Capability Model* (IACM), dan Friesta Angela Luciana S (2021) mengevaluasi peningkatan kapasitas Intern Pemerintah (APIP) (Studi pada Inspektorat Kota Prabumulih). Uswahatun Hasanah, Atiek Sri Purwati², dan Penelitian Firmansyah (2022).

Dengan memaksimalkan unsur-unsur yang ada dalam audit internal, Inspektorat Kabupaten Pinrang diharapkan dapat meningkatkan dan memantau kapabilitas APIP. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap kondisi kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Pinrang, meliputi langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pengawasan dari perspektif IACM dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat dan meningkatkan kapabilitas APIP. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat membantu Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan pemerintahan, maka peneliti memutuskan untuk menerbitkan penelitian ini dengan judul "Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Menggunakan Internal Audit Capability Model (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Pinrang)".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memahami nilai dari satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel-variabel tersebut (Sugiyono, 2013). Fokus penelitian adalah peningkatan level kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Pinrang beserta tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang, mulai November 2024 hingga Januari 2025.

Target dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pegawai Inspektorat Kabupaten Pinrang yang memahami proses audit, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan internal. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling agar memperoleh data yang relevan dan mendalam.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini mencakup beberapa tahapan:

1. Pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Analisis dokumen terkait seperti laporan audit, kebijakan internal, dan dokumen administratif.
3. Pengisian formulir kapabilitas APIP berdasarkan model IA-CM untuk menentukan level kapabilitas.

Data dan Instrumen

Data yang digunakan terdiri dari: **Data primer** diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pegawai Inspektorat Kabupaten Pinrang. **Data sekunder** berasal dari dokumen resmi, seperti laporan audit, peraturan pemerintah, dan kebijakan internal. Instrumen



yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, serta formulir IA-CM untuk mengukur tingkat kapabilitas APIP.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara semiterstruktur dilakukan dengan pejabat APIP yang mengikuti penilaian mandiri.
2. Observasi terfokus pada implementasi kapabilitas APIP.
3. Dokumentasi berupa laporan audit, kebijakan, dan dokumen pendukung penilaian kapabilitas APIP.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data berdasarkan enam elemen IA-CM.
2. Menganalisis formulir kapabilitas APIP berdasarkan 240 pernyataan dalam 41 KPA.
3. Menentukan tingkat kapabilitas APIP berdasarkan jawaban "ya," "sebagian," atau "tidak" pada formulir isian.
4. Menghitung persentase pemenuhan area proses kunci dan menyimpulkan tingkat kapabilitas APIP.
5. Mendeskripsikan pencapaian level kapabilitas dan memberikan rekomendasi peningkatan.

Keseluruhan metode ini bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Pinrang agar dapat mencapai target yang ditetapkan dalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Metode pengumpulan data primer mencakup observasi dan dokumentasi. Observasi bertujuan untuk memahami kondisi aktual serta prosedur yang sedang berlangsung di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang. Sementara itu, dokumentasi mencakup data administratif yang relevan, seperti formulir isian APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Formulir ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam menilai kapabilitas APIP dan didasarkan pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Formulir ini berisi kemampuan APIP yang mencakup berbagai topik yang terkait dengan Area Proses Utama (KPA). KPA merupakan proses utama yang harus diikuti untuk meningkatkan kapasitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Informasi yang diperoleh dari formulir ini digunakan untuk menentukan seberapa baik Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang memahami elemen-elemen yang diuraikan dalam Model Kemampuan Audit Internal (IA-CM).

Model IA-CM digunakan untuk menilai tingkat kapabilitas audit internal berdasarkan beberapa elemen kunci, seperti pengelolaan, metodologi audit, manajemen sumber daya manusia, komunikasi dan pelaporan, serta pelatihan karyawan. Setiap elemen ditentukan oleh indikator yang mengukur kapabilitas kematangan APIP. Berdasarkan data yang diperoleh melalui formulir tersebut, dilakukan analisis untuk menentukan level kapabilitas setiap elemen IA-CM. Level kapabilitas ini mengacu pada skala tertentu, mulai dari Level 1 (*Initial*) hingga Level 5 (*Optimized*), yang mencerminkan sejauh mana APIP telah memenuhi standar internasional yang diharapkan. Hasil analisis memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang. Selain itu, hasil ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi peningkatan kapabilitas APIP, sehingga Inspektorat dapat menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel sesuai standar yang berlaku.

Hasil Analisis Data

Berdasarkan evaluasi *Key Process Area* (KPA) untuk setiap elemen, contoh kinerja keseluruhan

setiap elemen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Capaian Level Elemen

No	Elemen	Key Process Area	Level	Pernyataan Nomor	Capaian %
1	Peran dan Layanan APIP	1. Audit Ketaatan	3	1-3	100%
		2. Audit Kinerja	3		100%
		3. Layanan Konsultasi	3		100%
2	Pengelolaan SDM	1. Identifikasi dan Rekrutmen SDM yang Komoeten	4	1-5	100%
		2. Pengembangan Profesi Individu	4		100%
		3. Koordinasi Tim	4		100%
		4. Pegawai yang Berkualifikasi Profesional	4		100%
		5. Membangun Tim dan Kompetensinya	4		100%
3	Praktik Profesional	1. Perencanaan Pengawasan Berdasarkan Prioritas Manajemen	3	1-4	100%
		2. Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya	3		100%
		3. Perencanaan Audit Berbasis Risiko	3		90%
		4. Kualitas Kerangka Kerja Manajemen	3		50%
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	1. Perencanaan Kegiatan APIP	3	1-5	100%
		2. Anggaran Operasional Kegiatan APIP	3		100%
		3. Pelaporan Organisasi APIP	3		100%
		4. Informasi Biaya	3		100%
		5. Pengukuran Kinerja	3		100%
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	1. Pengelolaan Organisasi APIP	3	1-3	100%
		2. Komponen Manajemen Tim yang Integral	3		100%
		3. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	3		100%
6	Struktur Tata Kelola	1. Hubungan Pelaporan Hasil	3	1-4	100%
		2. Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	3		100%
		3. Mekanisme Pendanaan	3		100%

		4. Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP	3		100%
--	--	--	---	--	------

Capaian tingkat Kapabilitas unit APIP Inspektor Kabupaten Pinrang dari hasil penilaian 6 elemen sesuai standart IA-CM adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Capaian Tingkat Level Kapabilitas APIP

Elemen		Level
I	Peran dan Layanan APIP	3
II	Pengelolaan SDM	4
III	Praktik Profesional	3
IV	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
V	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
VI	Struktur Tata Kelola	3

Keterangan = dengan catatan perbaikan (dcp)

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa terdapat unsur-unsur yang dimasukkan dalam penilaian kemampuan Unit APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang. Unsur-unsur berikut telah mencapai "Level 3" dari daftar unsur-unsur di atas: "Peran dan Layanan APIP," "Praktik Profesional," "Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja," "Budaya dan Hubungan Organisasi," dan "Struktur Tata Kelola." Unsur "Pengelolaan SDM" terletak pada "Level 4" dan menunjukkan bahwa konsumsi sehari-hari manusia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan unsur lainnya. Karena lima elemen yang memiliki nilai pada "Level 3" dan satu elemen pada "Level 4", maka secara keseluruhan, kapabilitas Unit APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang dinilai pada "Level 3" yang menunjukkan bahwa elemen-elemen penting dalam organisasi tersebut telah terintegrasi dengan baik. Penilaian "Level 3" berarti bahwa semua elemen penting telah berada pada tingkat kapabilitas yang memadai dan berfungsi dengan efektif, meskipun ada ruang untuk perbaikan atau peningkatan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa Unit APIP telah memenuhi sebagian besar persyaratan untuk mencapai tingkat kapabilitas yang lebih tinggi.

Pembahasan

1. Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Pinrang Dengan Mengacu pada *Standart Internal Audit Capability Model (IA-CM)*.

Berdasarkan analisis kapabilitas Inspektorat Kota Kabupaten Pinrang dengan menggunakan unsur *Standart Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, dapat disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pinrang tingkat 3 adalah yang paling tinggi. Sebab unsur yang hadir di level 3, yakni "Peran dan Layanan APIP," "Pengelolaan SDM," "Praktik Profesional," "Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja," "Budaya dan Hubungan Organisasi," dan "Struktur Tata Kelola," Inspektorat Kabupaten Pinrang belum mencapai level 3. Inspektorat Kabupaten Pinrang harus mengikuti tindakan perbaikan tertentu agar bisa mencapai level 3 penuh, yang selanjutnya akan dibahas pada sub-3 strategi peningkatan kemampuan APIP yang masih di bawah batas minimal. Berada pada level 3, dapat dinyatakan bahwa APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang telah berhasil menyelesaikan praktik profesi dan audit internal secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu APIP yang telah mencapai level 3 adalah "Telah mampu menilai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan suatu program atau kegiatan serta dapat memberikan saran kepada pengelola, pengelola risiko, dan pengembangan intern."

2. Elemen yang mempengaruhi ketertinggalan Kapabilitas APIP Pada Inspektorat

Kabupaten Pinrang.

Dari hasil penilaian kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang melalui 6 elemen menggunakan Standar IA-CM menyatakan unit APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang berada pada level 3 dengan catatan perbaikan, yang berarti masih ada elemen yang belum terpenuhi untuk dapat mencapai Level 3 penuh. Adapun elemen-elemen yang mempengaruhi ketertinggalan kapabilitas APIP mencapai level 3 adalah sebagai berikut:

Elemen Praktik Profesional (*Profesional Practice*)

Pada elemen Praktik Profesional untuk mencapai level 3 terdapat total 7 KPA yang harus terpenuhi. Dari total 7 KPA, ada 2 KPA yang masih belum terpenuhi yaitu KPA “Perencanaan audit berbasis risiko” 90% dan KPA “Kualitas Kerangka Kerja Manajemen” yang masih 50%. Adapun penjelasan KPA yang tidak terpenuhi adalah sebagai berikut :

1) KPA : Perencanaan audit berbasis risiko

- a. Masih banyak auditor yang belum sepenuhnya memahami metode audit berbasis risiko, khususnya dalam proses identifikasi dan evaluasi risiko yang kompleks.
- b. Identifikasi risiko inheren dan residual belum dilakukan secara menyeluruh atau ada risiko signifikan yang tidak terdeteksi.
- c. Dokumentasi hasil analisis dan perencanaan audit berbasis risiko belum memenuhi standar yang diharapkan, seperti kurang detail atau tidak distandarkan.

2) KPA : Kualitas Kerangka Kerja Manajemen

- a. Jumlah pegawai atau auditor yang memiliki keahlian khusus dalam pengawasan manajemen belum mencukupi atau tidak merata.
- b. SOP untuk pelaksanaan pengawasan atau pengelolaan keuangan dan aset belum lengkap atau belum diperbarui sesuai aturan terbaru.
- c. Sistem informasi (misalnya, aplikasi Srikandi atau pengawasan berbasis elektronik) belum dioptimalkan untuk mendukung pengawasan manajemen yang efisien.
- d. Kurangnya pelatihan reguler untuk pegawai dalam memahami kerangka kerja pengawasan berbasis risiko dan manajemen modern.
- e. Kurangnya sinergi antar bidang dalam Inspektorat menyebabkan informasi yang diperlukan untuk pengawasan tidak terbagi secara optimal.

3. Strategi yang dilakukan untuk peningkatan kapabilitas APIP yang belum maksimal.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Presiden Republik Indonesia ingin meningkatkan kapasitas APIP sebesar 85% pada saat Kementerian/Lembaga/Daerah mencapai kapabilitas level 3 pada tahun 2024. Hal ini menyoroti betapa pentingnya menggunakan APIP sebagai perangkat strategis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Melihat pencapaian Inspektorat Kabupaten Pinrang, saat ini Inspektorat masih berada dalam proses peningkatan kapabilitas menuju level 3 penuh. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan strategi yang berfokus pada pemenuhan Key Process Area (KPA) yang belum terpenuhi. Berikut langkah strategis yang dapat dilakukan:

1) KPA : Perencanaan Audit Berbasis Risiko

- a. Auditor belum sepenuhnya memahami metode audit berbasis risiko. Solusi strateginya adalah: Melaksanakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan pemahaman auditor tentang metode audit berbasis risiko, dengan fokus pada identifikasi dan evaluasi risiko yang kompleks.
- b. Identifikasi risiko inheren dan residual belum dilakukan secara menyeluruh. Solusi strateginya adalah; Menerapkan pendekatan yang lebih sistematis dalam melakukan identifikasi dan penilaian risiko.
- c. Dokumentasi hasil analisis dan perencanaan audit berbasis risiko belum memenuhi standar. Solusi strateginya adalah; Mengembangkan dan menerapkan standar dokumentasi yang jelas dan terstruktur untuk hasil analisis dan perencanaan audit berbasis risiko.

2) KPA : Kualitas Kerangka Kerja Manajemen



- a. Peningkatan SDM: Melakukan rekrutmen atau pelatihan untuk pegawai dengan keahlian khusus dalam pengawasan manajemen secara berkala.
- b. Pembaruan SOP: Menyusun tim untuk melakukan review dan pembaruan SOP secara rutin sesuai dengan peraturan terbaru.
- c. Optimalisasi Sistem Informasi: Meningkatkan penggunaan aplikasi Srikandi dan sistem pengawasan berbasis elektronik melalui pelatihan dan perbaikan fitur.
- d. Pelatihan Reguler: Menyusun program pelatihan reguler untuk pegawai mengenai pengawasan berbasis risiko dan manajemen modern.
- e. Meningkatkan Sinergi: Mendorong kolaborasi antar bidang melalui rapat koordinasi rutin dan platform berbagi informasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat Kapabilitas unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Pinrang berada pada level 3 dengan catatan perbaikan (*Integrated*).
2. Elemen yang mempengaruhi ketertinggalan Kapabilitas unit APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang adalah elemen yang belum mencapai level 3 penuh yaitu elemen “Paktik Profesional (*Profesional Practice*)” dengan indicator Perencanaan Audit Berbasis Risiko dan Kualitas Kerangka Kerja Manajemen.
3. Berdasarkan hasil penilaian yang menyatakan berada pada level 3 dengan catatan perbaikan berarti unit APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang dalam memenuhi target RPJMN sudah hampir memenuhi, sehingga masih harus terus melaksanakan strategi agar Unit APIP dapat memenuhi level 3 penuh.

Adapun saran peneliti yakni untuk meningkatkan kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Pinrang. Berikut ini beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan rutin bagi auditor, terutama dalam metode audit berbasis risiko, agar lebih efektif dalam pengawasan. Selain itu, pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berkala harus dilakukan untuk memastikan proses audit berjalan sesuai regulasi terbaru dan lebih akuntabel. Optimalisasi teknologi juga menjadi faktor penting, dengan meningkatkan penggunaan aplikasi pengawasan seperti web Srikandi serta memberikan pelatihan kepada pegawai agar mereka dapat memanfaatkannya secara maksimal. Selanjutnya, penguatan sinergi antar bidang dalam Inspektorat perlu ditingkatkan melalui koordinasi intensif, seperti rapat rutin dan pengembangan platform berbagi informasi guna mempercepat tindak lanjut hasil audit. Terakhir, implementasi perencanaan audit berbasis risiko harus dilakukan secara lebih terstruktur, dengan mengidentifikasi risiko inheren dan residual untuk menentukan prioritas audit yang lebih fokus dan efisien. Dengan langkah-langkah ini, pengawasan dapat berjalan lebih optimal, mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Mellyanti Sari. (n.d.). *Peran Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Ciamis)*”.
- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2018). Model peningkatan kapabilitas sumber daya aparat pengawasan internal pemerintah di jawa barat. *Jurnal Ekonomologi Ilmu Manajemen*, 5(1), 283–286. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
- Airlangga, D. K., & Rossieta, H. (2023). Peningkatan Kapabilitas Internal Audit Instansi Pemerintah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3028–3040. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1661>
- Arifa, C., & Angela Luciana, F. S. (2021). Evaluasi peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (apip) (Studi pada Inspektorat Kota Prabumulih). *ABIS: Journal AK-99*

- Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(2), 1–22. <https://doi.org/10.22146/abis.v9i2.65891>
- Bahari, A., & Inramus, W. (2018). Analisis Peningkatan Kapabilitas SDM Bidang Pengawasan Intern Pemerintah Berdasarkan Internal Audit Capability Model (IACM). *Andalas Management Review*, 2(2), 11–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/amar.2.2.11-27.2018>
- Dussel Soduppangon Banjarnahor. (n.d.). *Peranan badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi sumatera utara dalam meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (apip) di daerah (Studi pada Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP)*.
- Fahmi, M., & Ratna Sari, D. (2018). Analisis kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (apip) menggunakan standart internal audit capability model (ia-cm) (studi kasus pada inspektorat kota tebing tinggi) periode 2017-2018. *Bina Akuntansi IBB*, 29(1), 1–16. <https://id.scribd.com/document/668113382/Analisis-Kapabilitas-Aparat-Pengawas-Internal-Pemerintah-Apip-Menggunakan-Standart-Internal-Audit-Capability-Model-Ia-cm>
- Firmansyah, Atiek Sri Purwati, & Uswahatun Hasanah. (2022). Analisis kapabilitas apip dengan perspektif internal audit capability model (ia-cm) (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyumas). *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 1(Volume 1, Nomor 1), 252–262. <https://jurnalonline.unsoed.ac.id/index.php/jras/article/view/6726>
- Hului, H. W., Irawan, B., & Kalalinggi, R. (2023). Pengelolaan Sumberdaya Manusia Dalam Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 11(1), 35–46. <https://doi.org/10.29103/jak.v11i1.8046>
- Ikhsan, A., Muhyarsyah, Hasrudy, T., & Oktaviani, A. (2014). Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis (M. S. Sukma Leman., SE. (ed.); Cetakan Pe). Ciptapustaka Media.
- Lumbantobing, J. H. R., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. (2015). Analisis kualitas aparat pengawas intern pemerintah dalam pengawasan keuangan daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* 6(1), 37. <https://doi.org/10.35800/jjs.v6i1.8449>
- Marsudi, S.Kar., M. H., & Asep Saepudin, S.Sn., M. . (2014). Metodologi Penelitian. In Digilib.Isi.Ac.Id. http://digilib.isi.ac.id/12802/1/Metodologi_Penelitian.pdf.pdf
- Pramai Sella Lilik Purwanti, A. (2019). Analisis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah menggunakan internal audit-capability model (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1), 1–10. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6101>
- Rabbany Masdan, S., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal riset akuntansi dan auditing "goodwill,"* 8(2), 150–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17780>
- Rifki, M. (2020). *Analisis peran aparat pengawas internal pemerintah dalam pengelolaan aset tetap milik daerah (studi pada inspektorat kabupaten tangerang)*. 3. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59317>
- SAA'DILLAH. (n.d.). *Tesis studi peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (apip) pada inspektorat daerah kota makassar study on increasing the capability of the government internal supervisory apparatus (apip) at the makassar city regional inspectorate*.
- Safitri, N., & Halim, A. (2021). Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Magelang. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(Volume 5, Nomor 3), 1–7. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59277>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Penerbit Alfabeta.

Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). *Jurnal Borneo*

- Administrator*, 16(2), 137–158. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654>
- Wira, H., Wua, M., Paul, D., Saerang, E., & Gamaliel, H. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Level Kapabilitas Berdasarkan Standar Internal Audit Capability Model (IA-CM) pada APIP Provinsi Sulawesi Utara (Studi pada Inspektorat Kota Manado dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 11(1), 59–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jrs.v11i1.29188>